

TEKNIS PELAKSANAAN PP 53 TAHUN 2010



**OLEH
SUWANTA, SH
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**

LATAR BELAKANG

1. Tuntutan Reformasi Birokrasi :

- a. Pelayanan Cepat
- b. Biaya Murah

2. Lingkup Reformasi Birokrasi

- a. Organisasi
- b. Tata Laksana

Reformasi Organisasi :

- 1. Kaya Fungsi Miskin Struktur
- 2. Dibutuhkan
- 3. Tidak Tumpang Tindih Kursi

Reformasi Tata Laksana

1. Penyederhanaan Prosedur
2. Praktis
3. Waktu dan Biaya Terukur

Reformasi Personil :

1. Komitmen Kerja
2. Peningkatan SDM

Ad. 1 Komitmen Kerja / Disiplin PNS :

- **Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan termasuk peraturan kedinasan**

Ad. 2 Peningkatan SDM

- **Skill / Pengetahuan**
- **Inovasi / Kreasi / Pembaharuan**

PP No.53 Tahun 2010

A. PRINSIP DASAR PP

1. Pembinaan dan Penegakan disiplin PNS, menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung masing-masing (Pasal 23).
2. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama sekali adalah Atasan langsung.



- 3. Apabila dugaan pelanggaran disiplin benar, maka sepanjang hukuman yg setimpal dgn pelanggaran tsb masih kewenangannya, maka atasan langsung tsb wajib menghukum.**
- 4. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung jenis hukuman yg setimpal utk PNS tsb adalah kewenangan atasan yg lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan disertai BAP yg telah dibuatnya.**

5. **Atasan langsung yg tdk memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan bawahan yg diduga melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yg jenisnya sama dgn jenis hukuman yg seharusnya dia jatuhkan kepada bawahanya.**
6. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan, krn itu setiap atasan langsung yg telah mengetahui pelanggaran bawahan, wajib memanggil, memeriksa dan menghukum atau melaporkan.

PASAL 3 KEWAJIBAN PNS

17 POIN antara lain;

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan;
11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Hukuman Disiplin yang harus dijatuhkan khusus untuk TMK

.5 hari

- Tegoran lisan

6 s/d 10 hari

- Tegoran tertulis

11 s/d 15 hari

- Pernyataan tidak puas secara tertulis

16 s/d 20 hari

- Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 thn

21 s/d 25 hari

- Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 thn

26 s/d 30 hari

- Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

31 s/d 35 hari

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

36 s/d 40 hari

- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

41 s/d 45 hari

- Pembebasan dari jabatan

46 s/d lebih

- Pemberhentian

Tidak mentaati jam kerja

- 7 ½ jam = 1 hari

PASAL 4 LARANGAN TERHADAP PNS

15 POIN antara lain;

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau org lain dgn menggunakan kewenangan org lain;
3. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dgn tujuan utk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tdk langsung merugikan negara.

7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung/tdk utk diangkat dlm jabatan;
8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yg berhubungan dgn jabatan dan / pekerjaannya;
10. Melakukan suatu tindakan / tdk yg dpt menghalangi / mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;

B. PEMANGGILAN

- 1. Setiap atasan langsung wajib memanggil bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk diperiksa**
- 2. Pemanggilan untuk diperiksa harus dilakukan tertulis.**
- 3. Surat panggilan harus dibuat minimal 7 hari sebelum tanggal disuruh ybs. menghadap untuk diperiksa.**
- 4. Apabila panggilan pertama tak diindahkan maka dilakukan panggilan kedua.**
- 5. Surat panggilan kedua tersebut paling lambat hari ke- 7 dari tanggal seharusnya ybs. menghadap pada surat panggilan pertama.**



- 6. Apabila panggilan kedua, juga tidak diindahkan, maka pelanggaran disiplin yang disangkakan dianggap diakui dan dapat dihukum tanpa di BAP.**
- 7. Karena ybs. tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka tuduhan pelanggaran dalam SK Hukuman Disiplin sesuai dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan**

C: PEMERIKSAAN

- 1. Apabila ybs. hadir pada saat panggilan pertama atau panggilan kedua, maka dilakukan tahap Pemeriksaan.**
- 2. Hasil pemeriksaan dilakukan dalam bentuk BAP.**
- 3. Format BAP harus dalam bentuk Tanya / Jawab.**
- 4. Agar BAP sistematis, sebaiknya pertanyaan no. 2 berasal dari jawaban ybs. atas pertanyaan no. 1 dan seterusnya.**
- 5. Sebelum membuat BAP, sebaiknya cari informasi tambahan pelanggaran disiplin ybs. dari pihak lain.**

- 6. Usahakan mendapatkan bukti-bukti / saksi-saksi pelanggaran ybs. sebelum di BAP.**
- 7. Sewaktu mem- BAP, usahakan kejujuran ybs. dalam menguraikan kronologis pelanggarannya.**
- 8. Apabila tidak sinkron pengakuan dengan informasi tambahan / bukti-bukti / saksi-saksi yang anda peroleh baru utarakan informasi tambahan / bukti / saksi yang anda peroleh.**
- 9. BAP agar diminta di tanda tangani oleh ybs.**

- 10. Apabila ybs tdk bersedia tanda tangan BAP, maka tuliskan pada BAP tsb di kolom tanda tangan ybs bahwa ybs tidak bersedia tanda tangan, dan BAP tsb sah dan dapat dipakai Apabila ybs tidak bersedia menandatangani BAP menghukum ybs.**
- 11. Serahkan satu set BAP tersebut kepada ybs, dan apabila tidak bersedia menerima, tuliskan bahwa ybs tidak bersedia menerima BAP di halaman terakhir.**
- 12. Sewaktu mem-BAP tersebut atasan langsung dapat dibantu teman sejawat atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan yang diperiksa, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap atasan langsung.**

D: TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

1. Ringan

- a. lisan.**
- b. tertulis**
- c. tidak puas**

2. Sedang

- a. tunda Kenaikan Gaji Berkala**
- b. tunda Kenaikan Pangkat**
- c. turun pangkat 1 tahun**

3. Berat

- a. turun pangkat 3 tahun**
- b. turun jabatan**
- c. bebas jabatan**
- d. pemberhentian dengan hormat TAPS PNS**
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS**

E. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN

1. Latar belakang perbuatannya :

- **Terpaksa dilakukan atau tidak.**
- **Disengaja atau tidak.**
- **Direncanakan atau tidak.**
- **Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.**

2. Berat / ringannya pelanggaran :

- **Pernah dilakukan PNS atau tidak.**
- **Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.**
- **Melanggar prinsip-prinsip kenegaraan atau tidak.**
- **Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.**

3. Akibat pelanggaran :

- **Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.**
- **Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.**
- **Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.**

4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.

- **Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.**
- **Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.**
- **Akibat hukum tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.**

5. Kesesuaian dengan peraturan

- **Apakah telah diterapkan limitatif dalam peraturan atau tidak.**

6. Kejujuran / Penyesalan ybs.

- **Apakah mempersulit atau tidak.**
- **Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.**
- **Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak.**
- **Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.**

F. KRITERIA DAMPAK NEGATIF PADA UNIT KERJA / INSTANSI / PEMERINTAH

1. Dampak pada Unit Kerja :

Apabila perbuatan hanya menghalangi / memperlambat tugas unit kerja yang tidak mempengaruhi tugas instansi dan tugas pemerintah. Misalnya : menyembunyikan absen unit , sehingga PNS lain tidak dapat absen.

2. Dampak pada Instansi :

Apabila perbuatan itu dilakukan maka mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan tugas unit dan mengakibatkan pelaksanaan tugas Instansi menjadi terpengaruh, sehingga merusak citra pelayanan Instansi.

3. Dampak pada Pemerintah :

Apabila akibat perbuatannya merusak citra Pemerintah / PNS umumnya atau menghalangi program pemerintah misalnya : Korupsi dan Narkoba.

Pejabat yg Berwenang Menghukum di Pusat (Psl. 16)

No	PJBW yg Menghukum	Jenis Kepegawaian	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	Semua	• Eselon I	Pasal 7 ayat (4) huruf b, c, d, e.
2	PPK Pusat	PNS Instansi	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
			3. IV/d – IV/e	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, d, e.
			4. Eselon II, Madya/ Penyelia	Pasal 7 ayat (3), (4)
			5. Eselon II yg bertanggung jawab langsung kpd PPK	Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
			6. IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a,d,e
			7. Eselon III, Muda/ Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
			8. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a, d, e.

		PNS DPK ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2)
			2. Fungsional Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c
			3. IV/d – IV/e	Pasal 7 ayat (2)
			4. Eselon II ke bawah, Madya, Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.
		PNS DPB ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, b, c.
			3. IV/d – IV/e	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
			4. Eselon II, Madya	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a,b,c
			5. IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
			6. Eselon III ke bawah, Muda/ Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a, b, c
			7. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a

		PNS DPK Keluar	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
			2. Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
			3. IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
		PNS DPB keluar	• Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah, IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf d, e
		PNS DPK/DPB ke Perwakilan RI	• Semua	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
		PNS DPK/DPB ke Negara Lain	• Semua	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, d, e
3	Eselon I	PNS Instansi	1. Eselon II, Jenjang Madya, IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (2)
			2. Eselon III, Muda/Penyelia, III/b – III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
		PNS DPB/DPK Kedalam	• Eselon II, Jenjang Madya, IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPB kedalam	• Eselon III, Muda/Penyelia III/b – III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

4	Eselon II	PNS Instansi	1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c – III/d	Pasal 7 ayat (2)
			2. Eselon IV, Pratama/ Pelaksana Lanjutan, II/c – III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
		PNS DPB/DPK ke dalam	• Eselon III, Muda/Penyelia, III/c – III/d	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPB ke dalam	• Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lajutan, II/c – III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
5	Eselon II yg atasan langsungnya PPK/ Eselon I non PPK. (Kanwil)	PNS Instansi	1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c – III/d	Pasal 7 ayat (2)
			2. Eselon IV Kebawah, Pertama/ Pelaksana lanjutan III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c.
		PNS DPB/DPK ke dalam	• Eselon III, Muda/Penyelia, III/c – III/d	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPB ke dalam	• Eselon IV, Pertama/ Pelaksana lanjutan, II/c – III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

6	Eselon III	PNS Instansi	1. Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c – III/b	Pasal 7 ayat (2)
			2. Eselon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula II/a – II/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
		PNS DPB/DPK ke dalam	• Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c – III/b	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPB ke dalam	• Eselon V, Pelaksana, Pelaksana Pemula II/a – III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
7	Eselon IV	PNS Instansi	1. Eselon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula II/a – II/b	Pasal 7 ayat (2)
			2. I/a – I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
		PNS DPB/DPK ke dalam	• Eselon V, Pelaksana/ Pelaksana Pemula, II/a – II/b	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPB ke dalam	• I/a – I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.

8	Eselon V	PNS Instansi	• l/a – l/d	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPK/DPB ke dalam	• l/a – l/d	Pasal 7 ayat (2)

Pejabat yg Berwenang Menghukum di Propinsi (Psl. 18,19)

No	PJBW yg Menghukum	Jenis Kepegawaian	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	Semua	• Eselon I	Pasal 7 ayat (4) huruf b,c,d,e.
2	PPK Propinsi	PNS Propinsi	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a
			2. Fungsional Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
			3. Fungsional Umum, IV/d – IV/e	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, d, e.
			4. Eselon II, Madya, Penyelia	Pasal 7 ayat (3), (4)
			5. Fungsional Umum, IV/a – IV/e	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
			6. Eselon III ke bawah, Muda, Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
			7. Fungsional Umum, III/d kebawah	Pasal 7 ayat (3)huruf c, (4) huruf a, d, e.

		PNS DPK ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2)
			2. Fungsional Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), (4) huruf b, c
			3. Fungsional Umum IV/d – IV/e	Pasal 7 ayat (2)
			4. Eselon II kebawah, Madya, Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf b, c.
		PNS DPB ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), (3), (4), huruf a
			2. Fungsional Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, b, c.
			3. Fungsional Umum IV/d – IV/e	Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a
			4. Eselon II, Madya	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, b, c
			5. Fungsional Umum IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
			6. Eselon III ke bawah, Muda, Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a, b, c
			7. Fungsional Umum III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4) huruf a

		PNS DPK Keluar	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a
			2. Eselon II ke bawah, Utama ke bawah	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
			3. Fungsional Umum IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (3), (4) huruf a, d, e
		PNS DPB keluar	• Eselon II ke bawah, Utama ke bawah, IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf d, e
3	Eselon I (Sekda)	PNS Propinsi di lingkungannya	1. Eselon II, Madya, IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (2)
			2. Eselon III, Madya, Penyelia, III/b – III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
		PNS DPB/DPK Kedalam	• Eselon II, Madya, IV/a – IV/c	Pasal 7 ayat (2)
		PNS DPB kedalam	• Eselon III, Madya, Penyelia III/b – III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
4	Eselon II	PNS Propinsi	1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c – III/d	Pasal 7 ayat (2)
			2. Eselon IV, Pratama, Pelaksana Lanjutan, II/c – III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.